

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata

M. Akbar Firmansyah Putra¹, Lukman Arif²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya
akbarfirmansyah0@gmail.com¹, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Tourism village-based tourism is one of the regional development strategies that is oriented towards community empowerment, improving the local economy, and preserving the environment in a sustainable manner. Gresik Regency implements this policy through Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Tourism Villages, one of which is the development of the Banyuurip Mangrove Center (BMC) in Ujungpangkah District as an ecotourism destination based on mangrove conservation. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Tourism Villages in the development of the Banyuurip Mangrove Center (BMC) Tourism Village in Ujungpangkah District, Gresik Regency. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of officials from the Gresik Regency Tourism Office, the Banyuurip Village Government, BMC managers, local communities, and tourism business actors. Data analysis uses an interactive model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn, while data validity is tested through triangulation of sources, techniques, and time. The results of the study show that the implementation of Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Tourism Villages in the development of the Banyuurip Mangrove Center (BMC) is quite effective. The findings of the study show that: (1) the achievement of policy objectives has been seen through the development of mangrove conservation-based tourism that provides economic, social, and environmental benefits for the community; (2) the alignment between planning and implementation is running quite well through the implementation of mangrove rehabilitation programs, educational tourism, and the construction of tourist facilities, although there are still constraints on funding and human resource capacity; (3) the institutional capacity of tourism managers has been formed and is able to carry out management functions, but still requires strengthening competence, professionalism, and resource support; (4) the quality of governance shows the application of the principles of transparency, participation, and accountability in tourism management, although the effectiveness of program evaluation still needs to be improved; (5) collaboration between actors has involved the government, communities, academics, and the private sector in the development of tourism and mangrove conservation, but coordination and synergy between stakeholders have not been fully optimal; and (6) the resulting sustainable impacts include increasing community economic activities, growing environmental awareness, and maintaining the mangrove ecosystem as a conservation area. However, challenges in the form of limited resources, funding, and institutional strengthening still need attention to increase policy effectiveness in a sustainable manner.

Keywords: *policy effectiveness, tourism village, mangrove ecotourism, Banyuurip Mangrove Center, Gresik Regency*

ABSTRAK

Pariwisata berbasis desa wisata menjadi salah satu strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kabupaten Gresik mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, salah satunya pada pengembangan Banyuurip Mangrove Center (BMC) di Kecamatan Ujungpangkah sebagai destinasi ekowisata berbasis konservasi mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata dalam pengembangan Desa Wisata Banyuurip Mangrove Center (BMC) di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik, Pemerintah Desa Banyuurip, pengelola BMC, masyarakat lokal, dan pelaku usaha wisata. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata dalam pengembangan Banyuurip Mangrove Center (BMC) tergolong cukup efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) ketercapaian tujuan kebijakan telah terlihat melalui berkembangnya wisata berbasis konservasi mangrove yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat; (2) keselarasan antara perencanaan dan implementasi berjalan cukup baik melalui pelaksanaan program rehabilitasi mangrove, wisata edukasi, dan pembangunan fasilitas wisata, meskipun masih terkendala pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) kapasitas kelembagaan pengelola wisata telah terbentuk dan mampu menjalankan fungsi pengelolaan, namun masih memerlukan penguatan kompetensi, profesionalisme, dan dukungan sumber daya; (4) kualitas tata kelola menunjukkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wisata, walaupun efektivitas evaluasi program masih perlu ditingkatkan; (5) kolaborasi antaraktor telah melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan wisata dan konservasi mangrove, namun koordinasi serta sinergi antar pemangku kepentingan belum sepenuhnya optimal; dan (6) dampak berkelanjutan yang dihasilkan mencakup peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, tumbuhnya kesadaran lingkungan, serta terjaganya ekosistem mangrove sebagai kawasan konservasi. Namun tantangan berupa keterbatasan sumber daya, pendanaan, dan penguatan kelembagaan masih perlu mendapat perhatian guna meningkatkan efektivitas kebijakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: efektivitas kebijakan, desa wisata, ekowisata mangrove, Banyuurip Mangrove Center, Kabupaten Gresik

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Sektor pariwisata dalam beberapa dekade terakhir tidak hanya dipandang sebagai aktivitas rekreasi semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya lokal. Organisasi

Pariwisata Dunia (UNWTO) menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, transportasi, perhotelan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pariwisata bahkan ditempatkan sebagai salah satu sektor unggulan dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia karena potensinya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023).

Perkembangan sektor pariwisata saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pariwisata konvensional menuju pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP) dan World Tourism Organization (UNWTO), pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk pengembangan wisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan baik untuk masa kini maupun masa depan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan, serta masyarakat setempat secara bersamaan. Pendekatan ini semakin relevan mengingat meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Salah satu bentuk implementasi pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan ekowisata (*ecotourism*). Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pendidikan lingkungan bagi wisatawan. Menurut Fennell (2025), ekowisata tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman wisata kepada pengunjung, tetapi juga mendorong konservasi sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Kaitannya dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan biodiversitas tinggi, ekowisata menjadi salah satu pendekatan yang potensial untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Salah satu bentuk ekowisata yang berkembang di Indonesia adalah wisata mangrove. Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Mangrove berperan sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, intrusi air laut, dan gelombang pasang, sekaligus menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut, seperti ikan, udang, kepiting, dan burung migran. Mangrove juga memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon (*blue carbon*), sehingga berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global (Alongi, 2020). Pengelolaan kawasan mangrove tidak hanya penting dari aspek lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan wisata berbasis konservasi.

Keberadaan ekosistem mangrove di Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman. Alih fungsi lahan untuk tambak, industri, pemukiman, serta aktivitas eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menyebabkan terjadinya degradasi kawasan mangrove di berbagai daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat bahwa kerusakan mangrove masih menjadi

salah satu persoalan lingkungan pesisir yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pengembangan wisata mangrove berbasis konservasi dalam kondisi demikian dipandang sebagai salah satu alternatif yang mampu mengintegrasikan kepentingan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (KLHK, 2023).

Dalam upaya mendorong pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengembangkan konsep desa wisata sebagai salah satu strategi pembangunan daerah. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, adat istiadat, maupun potensi alam yang dimiliki. Desa wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku di desa tersebut.

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, desa wisata juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Aji et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat lokal, dukungan pemerintah, serta keberadaan kelembagaan yang mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan. Kebijakan desa wisata menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Selain dikenal sebagai kawasan industri dan kota santri, Kabupaten Gresik juga memiliki berbagai potensi wisata alam, budaya, religi, serta wisata pesisir yang dapat dikembangkan secara optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik (2025), jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan domestik mencapai 4.513.723 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 18.655 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang semakin penting terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu wilayah di Kabupaten Gresik yang memiliki potensi wisata pesisir adalah Kecamatan Ujungpangkah. Kecamatan ini dikenal memiliki kawasan mangrove yang luas dan menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir Kabupaten Gresik. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik (2025), luas kawasan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah mengalami peningkatan dari 1.055,08 hektar pada tahun 2010 menjadi 1.615,54 hektar pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pelestarian lingkungan yang cukup baik sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan wisata berbasis mangrove.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam pengembangan desa wisata yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi lokal desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021).

Salah satu desa yang menjadi bagian dari implementasi kebijakan tersebut adalah Desa Banyuurip yang berada di Kecamatan Ujungpangkah. Desa ini memiliki destinasi wisata berbasis konservasi mangrove yang dikenal dengan nama Banyuurip Mangrove Center (BMC). Kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang mengintegrasikan fungsi konservasi, edukasi, dan rekreasi. Pengelolaan kawasan dilakukan melalui keterlibatan masyarakat lokal, khususnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang bekerja sama dengan pemerintah desa dan berbagai pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan kawasan mangrove.

Banyuurip Mangrove Center memiliki nilai strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan lingkungan dan konservasi pesisir. Pengunjung yang datang tidak hanya menikmati keindahan kawasan mangrove, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Kondisi ini sejalan dengan konsep ekowisata yang menempatkan aspek edukasi dan konservasi sebagai bagian integral dari aktivitas wisata (Fennell, 2025).

Namun implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 dalam pengembangan Banyuurip Mangrove Center masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan (Alfiandri et al., 2024; Rahardian, 2024). Pada praktiknya, pengembangan BMC masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, promosi wisata, serta koordinasi antaraktor yang belum optimal.

Penelitian Sauqiya (2023) menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 pada desa wisata Mojopurowetan telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi hambatan dalam aspek administrasi dan pemasaran wisata. Penelitian Sumaryam et al. (2022) menegaskan bahwa pengembangan ekowisata mangrove di Desa Banyuurip sangat dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat dan partisipasi warga dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata. Penelitian Raynaldi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian

sebelumnya berfokus pada strategi pengembangan desa wisata, modal sosial, atau tata kelola kolaboratif, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 dalam pengembangan ekowisata mangrove masih relatif terbatas. Padahal, evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata dalam menunjang pengembangan Desa Wisata Banyuurip Mangrove Center (BMC) di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Analisis efektivitas dilakukan melalui enam dimensi utama, yaitu ketercapaian tujuan kebijakan, keselarasan antara perencanaan dan implementasi, kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, kolaborasi antaraktor, serta dampak berkelanjutan yang dihasilkan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan implementasi kebijakan desa wisata sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan Banyuurip Mangrove Center yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan publik dalam konteks pengembangan Desa Wisata Banyuurip Mangrove Center (BMC) di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik maupun pengujian hipotesis, melainkan berupaya mengungkap makna, persepsi, pengalaman, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan desa wisata yang tidak hanya dilihat dari capaian formal, tetapi juga dari proses implementasi, keterlibatan aktor, serta dampak yang dirasakan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji satu objek penelitian, yaitu Desa Banyuurip sebagai desa wisata yang mengembangkan kawasan Banyuurip Mangrove Center (BMC). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata sehingga dapat mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala implementasi kebijakan (Farhan et al., 2023). Penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan praktik

implementasinya di lapangan. Studi kasus yang digunakan bersifat intrinsik karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kasus tertentu tanpa tujuan untuk melakukan generalisasi secara luas.

Penelitian dilaksanakan di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, yang merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Lokasi ini dipilih karena memiliki objek wisata unggulan berupa Banyuurip Mangrove Center (BMC) yang dikembangkan sebagai kawasan ekowisata berbasis konservasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini dinilai relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan karena terdapat indikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil implementasi yang terlihat dari masih terbatasnya fasilitas wisata, tingkat kunjungan wisatawan yang belum optimal, serta manfaat ekonomi yang belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Analisis dilakukan berdasarkan enam dimensi efektivitas yang disintesis dari teori Putrawan (2025), yaitu ketercapaian tujuan kebijakan, keselarasan antara perencanaan dan implementasi, kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, kolaborasi antaraktor, dan dampak berkelanjutan yang dihasilkan. Keenam indikator tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan desa wisata mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Alfiandri et al., 2024). Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan desa wisata. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Gresik, Pemerintah Desa Banyuurip, pengelola Banyuurip Mangrove Center (BMC), masyarakat lokal, serta pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, tetapi mengikuti prinsip data saturation atau kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai persepsi, pengalaman, serta pandangan informan terkait efektivitas implementasi kebijakan desa wisata. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif dengan mengamati langsung kondisi sarana dan prasarana wisata, aktivitas pengelolaan kawasan BMC, interaksi antaraktor, serta kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui pengumpulan dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, dokumen perencanaan desa, laporan kegiatan, data statistik Badan Pusat

Statistik Kabupaten Gresik, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis berdasarkan masing-masing indikator efektivitas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan desa wisata di Desa Banyuurip.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap fenomena yang sama. Triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Melalui penerapan triangulasi tersebut, data yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata dalam pengembangan Banyuurip Mangrove Center (BMC) di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketercapaian Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan Desa Wisata Banyuurip Mangrove Center (BMC). Tujuan utama kebijakan yang meliputi pengembangan potensi wisata desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelestarian lingkungan mulai menunjukkan hasil yang positif. Keberadaan BMC tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan edukasi dan konservasi mangrove yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Banyuurip menunjukkan bahwa pengembangan wisata mangrove telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Sejak adanya BMC, masyarakat mulai mendapatkan tambahan penghasilan dari aktivitas wisata, seperti berjualan makanan, penyewaan perahu, dan jasa lainnya. Walaupun belum besar, manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat.” (Wawancara, Kepala Desa Banyuurip, 2025).

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian mangrove juga mulai terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove.

“Dulu masyarakat melihat mangrove hanya sebagai tanaman biasa, sekarang mereka mulai sadar bahwa mangrove bisa menjadi sumber manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan pesisir.” (Wawancara, Pengelola BMC, 2025).

Ketercapaian tujuan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan potensi yang dimiliki kawasan wisata tersebut.

Keselarasan antara Perencanaan dan Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BMC telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang disusun oleh pemerintah desa bersama kelompok pengelola dan masyarakat. Program-program seperti rehabilitasi mangrove, pembangunan jalur tracking, penyediaan fasilitas wisata, serta wisata edukasi telah dilaksanakan sesuai arah kebijakan desa wisata.

Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa BMC merupakan salah satu desa wisata yang mendapatkan pendampingan dalam proses pengembangannya.

“Secara perencanaan sudah sesuai dengan arah pengembangan desa wisata berbasis lingkungan. Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pembinaan dan fasilitasi program sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.” (Wawancara, Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik, 2025).

Namun implementasi beberapa program belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran dan kemampuan teknis pengelola.

“Ada beberapa rencana pengembangan fasilitas yang belum bisa direalisasikan karena keterbatasan dana. Jadi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan yang ada.” (Wawancara, Ketua Pokdarwis BMC, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara perencanaan dan implementasi, meskipun realisasi program masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Kapasitas Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan BMC dilakukan oleh kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Banyuurip. Struktur organisasi pengelola telah terbentuk dan memiliki pembagian tugas yang jelas dalam kegiatan operasional wisata maupun konservasi mangrove.

Pengelola BMC menjelaskan bahwa kelembagaan wisata berkembang dari kelompok masyarakat peduli lingkungan yang kemudian bertransformasi menjadi pengelola wisata desa.

“Awalnya kami bergerak dalam kegiatan pelestarian mangrove. Seiring berkembangnya wisata, kami membentuk struktur organisasi agar pengelolaan lebih terarah.” (Wawancara, Pengelola BMC, 2025).

Meskipun telah memiliki kelembagaan yang berjalan, kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Sebagian besar pengelola belum memiliki latar belakang profesional dalam bidang pariwisata maupun manajemen destinasi wisata.

“Kami masih membutuhkan banyak pelatihan, terutama terkait pengelolaan wisata, promosi digital, dan pelayanan wisatawan.” (Wawancara, Pengelola BMC, 2025).

Keterbatasan dukungan pendanaan juga memengaruhi kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan fasilitas dan program wisata secara lebih optimal.

Kualitas Tata Kelola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan BMC telah menerapkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Setiap program yang berkaitan dengan pengembangan wisata umumnya dibahas melalui forum musyawarah desa maupun rapat kelompok pengelola.

Kepala Desa Banyuurip menjelaskan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata.

“Kami selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, termasuk ketika membahas program wisata mangrove agar semua pihak mengetahui arah pengembangannya.” (Wawancara, Kepala Desa Banyuurip, 2025).

Dari aspek akuntabilitas, penggunaan dana dan pelaksanaan program dilaporkan secara berkala kepada pemerintah desa maupun pihak yang memberikan dukungan program.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih belum terlibat aktif dalam kegiatan wisata.

“Masih ada masyarakat yang belum ikut terlibat karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung dari wisata ini.” (Wawancara, Tokoh Masyarakat Banyuurip, 2025).

Mekanisme evaluasi program juga masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan perbaikan yang lebih signifikan dalam pengelolaan wisata.

Kolaborasi Antar Aktor

Pengembangan Banyuurip Mangrove Center melibatkan berbagai pihak yang terdiri atas pemerintah desa, masyarakat, kelompok pengelola, pemerintah daerah,

perguruan tinggi, komunitas lingkungan, serta sektor swasta. Kolaborasi ini dilakukan dalam bentuk pendampingan, penelitian, pelatihan, dan kegiatan konservasi mangrove.

Pengelola BMC menjelaskan bahwa berbagai pihak telah memberikan dukungan terhadap pengembangan wisata mangrove.

“Kami sering bekerja sama dengan kampus, komunitas lingkungan, dan perusahaan yang memiliki program CSR untuk kegiatan penanaman mangrove maupun pelatihan masyarakat.” (Wawancara, Pengelola BMC, 2025).

Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik juga menyatakan bahwa pengembangan desa wisata memerlukan dukungan lintas sektor agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Desa wisata tidak bisa berkembang sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi agar hasilnya lebih optimal.” (Wawancara, Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik, 2025).

Meskipun kolaborasi telah berjalan, koordinasi antar aktor masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa program masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam kerangka kerja sama jangka panjang.

Dampak Berkelanjutan yang Dihasilkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BMC telah memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan melalui berbagai aktivitas usaha yang muncul di sekitar kawasan wisata.

Salah satu pelaku usaha lokal menyampaikan:

“Saat ada wisatawan yang datang, penjualan makanan dan minuman meningkat. Walaupun belum setiap hari ramai, tetapi sudah membantu menambah penghasilan.” (Wawancara, Pelaku Usaha Lokal, 2025).

Dari aspek sosial, keberadaan BMC meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan konservasi dan kebersihan lingkungan.

“Sekarang masyarakat lebih peduli terhadap mangrove karena mereka sudah melihat manfaatnya, baik untuk lingkungan maupun untuk wisata.” (Wawancara, Tokoh Masyarakat Banyuurip, 2025).

Dari aspek lingkungan, kegiatan rehabilitasi dan penanaman mangrove yang dilakukan secara rutin telah membantu menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Namun keberlanjutan manfaat tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan. Diperlukan dukungan yang berkelanjutan dari

berbagai pihak agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah terbentuk dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Pembahasan

Ketercapaian Tujuan Kebijakan

Ketercapaian tujuan kebijakan merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan publik. Menurut Putrawan (2025), efektivitas tercermin dari kemampuan kebijakan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan mengembangkan potensi desa melalui pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah mulai terwujud melalui pengembangan Banyuurip Mangrove Center (BMC) sebagai destinasi ekowisata berbasis konservasi. Keberadaan BMC memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui aktivitas usaha wisata, perdagangan, dan jasa pendukung. Kegiatan konservasi mangrove dan wisata edukasi juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan pesisir.

Meskipun demikian, pencapaian tujuan kebijakan masih belum optimal karena manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat belum merata dan tingkat kunjungan wisata masih berfluktuasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sauqiya (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi Perda Desa Wisata di Kabupaten Gresik telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi kendala pada aspek penguatan kapasitas masyarakat dan optimalisasi program. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Fidelitasari et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan desa wisata sering terkendala oleh distribusi manfaat yang belum merata dan keterbatasan kapasitas pengelola. Ketercapaian tujuan kebijakan di BMC dapat dikategorikan cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan agar seluruh sasaran kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Keselarasan antara Perencanaan dan Implementasi

Keselarasan antara perencanaan dan implementasi menunjukkan tingkat konsistensi antara program yang dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan. Kairupan & Mowilos (2025) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BMC telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan desa wisata melalui pembangunan jalur tracking mangrove, kegiatan rehabilitasi mangrove, wisata edukasi, dan penyediaan fasilitas wisata. Program-program tersebut menunjukkan adanya keterhubungan antara perencanaan yang tertuang dalam kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan.

Namun beberapa program belum dapat direalisasikan secara optimal karena keterbatasan pendanaan dan kemampuan teknis pengelola. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target yang direncanakan dengan kemampuan

implementasi di tingkat lokal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Raynaldi et al. (2024) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan desa wisata sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, sarana pendukung, dan koordinasi antar pihak. Meskipun perencanaan dan implementasi di BMC telah berjalan cukup selaras, peningkatan dukungan sumber daya tetap diperlukan agar seluruh program dapat diwujudkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumardi (2025) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi, dan ketersediaan sumber daya pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMC telah memiliki kelembagaan yang melibatkan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pengelola wisata. Kelembagaan tersebut telah mampu menjalankan fungsi pengelolaan wisata dan konservasi secara berkelanjutan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Kapasitas kelembagaan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek kompetensi sumber daya manusia dan pendanaan. Sebagian besar pengelola masih berasal dari masyarakat lokal yang belum memiliki pengalaman profesional dalam pengelolaan destinasi wisata. Keterbatasan anggaran juga memengaruhi kemampuan organisasi dalam mengembangkan fasilitas dan promosi wisata. Temuan ini mendukung penelitian Fidelitasari et al. (2023) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata. Penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kualitas Tata Kelola

Kualitas tata kelola berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Irawanto (2025), efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh hasil yang dicapai, tetapi juga oleh kualitas proses yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMC telah menerapkan prinsip keterbukaan melalui rapat koordinasi dan forum masyarakat yang membahas program serta penggunaan anggaran. Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan wisata dan konservasi lingkungan.

Namun tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata dan sebagian masyarakat belum menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam pengembangan wisata. Evaluasi program yang dilakukan secara berkala belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola BMC telah mengarah pada prinsip *good governance*, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek partisipasi,

akuntabilitas, dan efektivitas evaluasi program. Kualitas tata kelola dapat dinilai cukup baik, namun belum mencapai kondisi yang optimal.

Kolaborasi Antar Aktor

Kolaborasi antar aktor merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Rahardian (2024) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan dalam kerangka *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam membangun sinergi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BMC melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dan pihak swasta. Keterlibatan berbagai aktor tersebut memberikan kontribusi dalam bentuk pelatihan, penelitian, pendampingan, serta dukungan terhadap konservasi dan pengembangan fasilitas wisata.

Meskipun kolaborasi telah terbangun, koordinasi antar pihak masih belum berjalan secara maksimal. Komunikasi yang belum terstruktur, perbedaan kepentingan antar kelompok, serta belum adanya mekanisme kerja sama yang formal menjadi kendala dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfiandri et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan ekowisata mangrove sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan hubungan kolaboratif antar aktor. Penguatan jejaring kerja sama dan pembentukan sistem kolaborasi yang lebih terstruktur diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan BMC di masa mendatang.

Dampak Berkelanjutan yang Dihasilkan

Dampak berkelanjutan merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Putrawan (2025) menegaskan bahwa kebijakan yang efektif harus mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya menghasilkan output jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BMC telah memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, wisata mangrove menciptakan peluang usaha dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Dari sisi sosial, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Sementara dari sisi lingkungan, kegiatan konservasi mangrove berkontribusi pada perlindungan ekosistem pesisir dan rehabilitasi kawasan mangrove.

Walaupun demikian, keberlanjutan dampak tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan ketergantungan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sumaryam et al. (2022) yang menegaskan bahwa keberlanjutan ekowisata mangrove sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan penguatan modal sosial lokal. Penelitian Alfiandri et al. (2024) juga menunjukkan bahwa keberlanjutan wisata mangrove memerlukan dukungan kelembagaan dan kolaborasi yang kuat.

Implementasi Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 telah menghasilkan dampak berkelanjutan yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, sumber daya, dan kerja sama antar pihak agar manfaat yang dihasilkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata dalam pengembangan Banyuurip Mangrove Center (BMC) di Kecamatan Ujungpangkah tergolong cukup efektif, karena telah mampu mendorong pengembangan wisata berbasis masyarakat sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan mangrove. Hal ini terlihat dari tercapainya sebagian tujuan kebijakan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, terbukanya peluang ekonomi lokal, serta berkembangnya aktivitas wisata edukasi mangrove. Perencanaan program juga telah mengakomodasi kebutuhan pengembangan wisata dan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Namun efektivitas kebijakan masih belum optimal karena terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendanaan, kapasitas kelembagaan yang belum kuat, tata kelola yang masih perlu ditingkatkan, serta koordinasi dan kolaborasi antaraktor yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan desa wisata, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memperkuat dukungan melalui peningkatan anggaran, pengembangan infrastruktur wisata, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pengelola dan masyarakat. Pemerintah Desa Banyuurip dan pengelola BMC juga perlu memperkuat kelembagaan organisasi, meningkatkan inovasi wisata berbasis edukasi dan konservasi, serta memperluas promosi destinasi guna meningkatkan daya tarik wisatawan. Masyarakat juga diharapkan terus berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung program pengembangan wisata. Penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lingkungan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengembangan Banyuurip Mangrove Center mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang lebih optimal serta berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, K. B., Salouw, E., Darajat, I. R., Irdana, N., & Suhartami, W. (2024). Mangrove Ecotourism Research Progress, Trends, and Updates: A Bibliometric Analysis Based on the Scopus and Web of Science Databases. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 52(1), 49–64. <https://doi.org/10.30892/gtg.52105-1182>
- Alfiandri, Prasojo, E., & Malik, J. A. (2024). Fostering Sustainable Mangrove Eco-tourism: A Collaborative Governance Approach in Bintan Island, Indonesia.

Jurnal Studi Pemerintahan, 15(3), 340–362.

Alongi, D. M. (2020). Carbon Balance in Salt Marsh and Mangrove Ecosystems : A Global Synthesis. *Journal of Marine Science and Engineering Review*, 8, 1–21.

Farhan, M. A., Zahra, S. A., Yuniastoeti SS, V., Al-Ghaniy, A., & Rahmafitria, F. (2023). *Efektifitas Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata terhadap Pembangunan Pariwisata di Desa Mekarlaksana*. 4, 151–165.

Fennell, D. (2025). *Ecotourism* (3rd Ed.). Routledge.

Fidelitasari, Q., Nugraha, V. A., Suryadi, K. A., Nasution, F. N. H., & Rahmafitria, F. (2023). Analisis Efektivitas Pencapaian Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 pada Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 19(2), 1–23. <https://doi.org/10.53691/jpi.v19i2.398>

Irawanto. (2025). *Good Governance: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Mutiara Publishing Indonesia.

Kairupan, S. B., & Mowilos, R. (2025). *Analisis Kebijakan Publik*. Tahta Media Group.

Putrawan, I. G. N. (2025). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Metro Press Indonesia.

Rahardian, R. (2024). *Teori-Teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer*. BRIN.

Raynaldi, R., Budiarto, R., & Rahmafitria, F. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata di Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. *Media Wisata*, 22(1), 145–157. <https://doi.org/10.36276/mws.v22i1.634>

Sauqiya, A. S. (2023). *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata: Studi di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sumardi. (2025). *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Konsep, Teori, dan Aplikasinya)*. Tahta Media Group.

Sumaryam, Illahi, R. W., Aida, G. R., & Trisbiantoro, D. (2022). Analisis Pendapatan Potensial Ekowisata Pasca Covid-19 Banyu Urip Mangrove Center (BMC) di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. *Journal Perikanan*, 12(4), 681–690.